

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat yang ingin mengetahui pemerintah yang baik telah mendorong pemerintah untuk menetapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Badjuri dan Trihapsari (2004) mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Akuntabilitas keuangan juga merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, tahap-tahap dalam akuntabilitas keuangan mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporan (LAN, 2001 dalam Malik Imro, 2005). Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang baik hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelaporan, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman dan menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Bagi pemerintah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah sudah berkualitas yaitu opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah.

Lalu laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh BPK adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan telah meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang telah disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Bastian (2010) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian menurut Wijaya (2008) SAP merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia tanpa adanya standar ini maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa jadi berbeda-beda disetiap daerah yang akan memunculkan persoalan baru ditingkat nasional.

Menurut Mentu (2016) SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, dimana pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar

tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan sehingga peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan.

SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik pemerintah pusat dan departemen-departemen maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP yakni akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan dipemerintahan pusat dan daerah menurut Dedi dan Hartianti (2006).

Pengelolaan keuangan yang sehat dalam rangka menciptakan *good corporate governance* juga harus diikuti dengan sumberdaya aparatur yang kompeten. Namun sudah menjadi permasalahan umum diinstansi pemerintah bahwa untuk penataan personil seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari aspek kualitas penataan personil yang dilakukan seringkali tidak mengikuti prinsip "*the right man on the right place*" hal ini sangat berkaitan dengan pengembangan organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan secara kualitas sumberdaya aparatur yang belum memenuhi kompetensi yang seharusnya dipenuhi (Aruan, 2003). Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang aparatur berupa pengetahuan, sikap dan perilaku dalam pelaksanaan tugasnya.

Peran audit internal berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam pasal 9 ayat (I) UU Nomor 15 Tahun 2004

disebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai.

Sistem pengendalian intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Pada tahun 2016 berdasarkan sumber bisnis.com temuan kementerian Pendidikan kebudayaan “ BPK memberikan opini Disclaimer disebabkan karena adanya pemborosan dan belanja fiktif di kemendikbud” BPK mulai mengaudit penggunaan anggaran Pendidikan di Kementerian Pendidikan pada tahun 2016 mengatakan bahwa koordinasi selama proses audit menentukan kelancaran pemeriksaan keuangan. Proses pengauditan tersebut mulai dilakukan setelah penyerahan laporan internal kemendikbud ke BPK. Sejumlah potensi masalah yang bisa ditemukan selama proses audit seperti kesalahan administrasi, pemborosan, belanja kemahalan dan belanja fiktif, temuan negatif harus bisa diselesaikan

secepatnya agar tidak berujung pada kerugian negara. Pada tahun sebelumnya yaitu 2015 kemendikbud memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), mengatakan penetapan opini tersebut menggunakan standar akuntansi berbasis sektoral serta melihat kesesuaian dengan apa yang dilakukan pemerintah. Kalau semua sudah dilakukan sesuai prosedur maka mudah mendapatkan opini wajar. Sementara itu Inspektur Jenderal kemendikbud mengatakan anggaran kemendikbud pada tahun 2016 mencapai Rp.49,23 triliun kemudian ada penghematan anggaran sebesar Rp. 5 triliun lebih sehingga anggaran bersih kemendikbud Rp.43,6 triliun. Lalu realisasi anggaran kemendikbud pada 2016 sebesar Rp. 38,55 triliun atau terserap 88,42% dari anggaran. Melihat dari tahun 2016 bahwa adanya temuan-temuan audit di kemendikbud, dengan ini berkesimpulan bahwa masih adanya kejanggalan penggunaan anggaran serta laporan tersebut masih disclaimer, kita bisa melihat apakah SAP, kompetensi aparatur dan peran audit internal serta sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan sudah memenuhi atau tidak. terkait pemborosan ini maka sistem pengendalian internalnya belum cukup baik.

Disamping itu peneliti menemukan berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan berdasarkan sumber kompas.com bahwa Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menjelaskan “banyak di daerah yang dapat WTP akan tetapi korupsi tetap jalan” dalam prapernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2018 di Kementerian Keuangan dengan itu selaku Menteri Keuangan mendorong seluruh Kementerian serta Pemerintah Daerah untuk tidak cepat puas dengan raihan

predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit laporan keuangan mereka oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jika laporan keuangan Kementerian atau Pemda meraih WTP mereka harus mengevaluasi kembali apa saja yang bisa dimaksimalkan lagi untuk efisiensi anggaran. Evaluasi bisa menasar pada aspek perencanaan kegiatan hingga pengambilan keputusan-keputusan strategis.

Jika setiap Kementerian atau Lembaga dapat menggunakan anggaran secara efektif, pelaksanaan APBN pun akan menjadi jauh lebih baik yang pada akhirnya menguatkan pertumbuhan ekonomi. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan, khususnya dari temuan-temuan BPK terhadap laporan keuangan yang telah di audit. Dengan fenomena tersebut bawa opini WTP yang didapat tidak sesuai dengan kenyataannya. Banyak Kementerian atau Lembaga merasa sudah cukup mendapat predikat WTP akan tetapi predikat WTP bukanlah tujuan akhir.

Fenomena lain yang ditemukan sumber kompas.com “KPK bersama Polri dan BPK bahas penanganan 2 kasus korupsi di Kalbar” Komisi pemberantas korupsi berkoordinasi dengan penyidik Polda Kalimantan Barat melakukan rapat koordinasi membahas penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi yang menggunakan dana APBD tahun anggaran 2012-2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp 13 miliar.

Selain itu kegiatan koordinasi juga membahas penanganan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan khusus desa dari BPKAD Kabupaten Bengkayang ke kepala desa di wilayah Bengkayang dengan anggaran bantuan Rp 20

miliar bersumber dari APBD tahun 2017. Saat ini penanganan perkara masih tahap penyidikan, mengumpulkan alat bukti serta proses perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPK RI.

Berdasarkan paparan diatas yang sudah peneliti paparkan fenomena kualitas informasi laporan keuangan merupakan topik yang menarik untuk peneliti teliti, serta adanya beberapa perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dipaparkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Program Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
2. Apakah Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
3. Apakah Peran Audit Internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?

4. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dalam memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
6. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dalam memoderasi kompetensi aparatur terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
7. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dalam memoderasi peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dalam rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan SAP sudah sesuai dengan kualitas informasi laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui apakah Kompetensi Aparatur sudah sesuai dengan kualitas informasi laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui apakah peran audit internal sudah sesuai dengan kualitas informasi laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui apakah pengaruh sistem pengendalian internal sudah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan

5. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dalam memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
6. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dalam memoderasi Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.
7. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dalam memoderasi Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan pengaruh dari penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal dengan sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan . Sehingga akan meningkatkan kualitas pemerintah dalam tujuan organisasi serta memberikan kontribusi dan acuan baik pada ilmu akuntansi laporan keuangan yang baik serta mampu memberikan pengetahuan kepada publik mengenai informasi yang ada didalam sebuah pemerintahan, penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai kualitas informasi laporan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.
- b) Bagi Peneliti berguna untuk memberi gambaran secara jelas bagaimana penelitian yang bersifat empiris dilakukan.
- c) Bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi ataupun sebagai data pembanding untuk penelitian sebelumnya.